

No.	INDEKS	FOKUS	No.	Indikator Kinerja Kunci (Outcome)	Rumus	Isian Elemen Data LPPD 2021	Capaian Kinerja	Isian Hasil Perbaikan Data	Capaian Kinerja	Catatan Hasil Klarifikasi	Panduan/Acuan	Catatan Permasalahan	Paraf
A.	INDEKS MAKRO	CAPAIAN MAKRO DAERAH	1	Laju Pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks Pembangunan Manusia Tahun 2020	69.18	0.53	69.18	0.53	Tetap			
					Indeks Pembangunan Manusia Tahun 2021	69.55		69.55					
			2	Laju Penurunan Angka Kemiskinan	Angka Kemiskinan Tahun 2020	3.83	-18.28	3.83	-18.28	Tetap		Data LPPD 2020 kurang tepat	
					Angka Kemiskinan Tahun 2021	4.53		4.53					
			3	Laju Penurunan Angka Pengangguran	Angka Pengangguran Tahun 2020	5.43	-2.95	5.43	-2.95	Tetap			
					Angka Pengangguran Tahun 2021	5.59		5.59					
			4	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Produk Domestik Regional Bruto ADHK Tahun	0.37	1002.70	16186.86	4.08	Berubah	https://muarojambikab.	Kesalahan input data ADHK bukan laju pertumbuhan	
					Produk Domestik Regional Bruto ADHK Tahun	4.08		16847.01					
			5	Laju Pertumbuhan Pendapatan Per Kapita	Pendapatan Per Kapita Tahun 2020	60.94	11.95	60.94	11.95	Tetap		Data LPPD Tahun 2020 kurang tepat	
					Pendapatan Per Kapita Tahun 2021	68.22		68.22					
			6	Penurunan Tingkat Ketimpangan Pendapatan	Ketimpangan Pendapatan Tahun 2020	0.28	-13.72	0.28	-13.72	Tetap			
					Ketimpangan Pendapatan Tahun 2021	0.32		0.32					
B.	INDEKS CAPAIAN URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB PELAYANAN DASAR	PENDIDIKAN	1.a.1	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	Jumlah anak usia 5-6 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di satuan PAUD	2,216.00	15.36	7,461.00	52.66	Berubah		Sudah mencakup data dari Kemenag	
					Jumlah anak usia 5-6 tahun pada provinsi	14,427.00		14,167.00					
			1.a.2	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam	Jumlah anak usia 7-12 tahun yang sedang belajar	37,047.00	81.06	47,773.00	99.42	Berubah		Sudah mencakup data dari Kemenag	
					Jumlah anak usia 7-12 tahun pada provinsi	45,704.00		48,051.00					
			1.a.3	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam	Jumlah anak usia 13-15 tahun yang sedang belajar	13,237.00	60.89	8,396.00	41.94	Berubah		Sudah mencakup data dari Kemenag	
					Jumlah anak usia 13-15 tahun pada provinsi yang	21,738.00		20,018.00					
			1.a.4	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	Jumlah anak usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang sudah tamat/ sedang belajar di pendidikan kesetaraan	-	tdi	180.00	13.39	Berubah		Sudah mencakup data dari Kemenag	
					Jumlah anak usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah pada provinsi yang bersangkutan	-		1,344.00					
		KESEHATAN	1.b.1	Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Rujukan	Jumlah daya tampung rumah sakit rujukan di kabupaten/kota	202.00	0.50	202.00	0.50	Tetap		Tambahkan bukti data dukung	
					Jumlah penduduk di kabupaten/kota	402,017.00		402,017.00					
			1.b.2	Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi	Jumlah RS rujukan yang terakreditasi	3.00	100.00	3.00	100.00	Tetap			
					Jumlah RS di kabupaten/kota	3.00		3.00					
			1.b.3	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan	7,848.00	88.62	7,848.00	88.62	Tetap		Terdapat perubahan yang ekstrim baik pada elemen data pembilang	
					Jumlah ibu hamil di kabupaten/kota	8,856.00		8,856.00					
			1.b.4	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan	8,145.00	93.48	8,145.00	93.48	Tetap		Terdapat perubahan yang ekstrim baik pada elemen data pembilang	
					Jumlah ibu bersalin di kabupaten/kota	8,713.00		8,713.00					
			1.b.5	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan layanan	7,884.00	97.93	7,884.00	97.93	Tetap		Terdapat perubahan yang ekstrim baik pada elemen data pembilang	
					Jumlah bayi baru lahir di kabupaten/kota	8,051.00		8,051.00					
			1.b.6	Cakupan pelayanan kesehatan balita	Jumlah balita yang mendapatkan layanan	31,172.00	100.00	31,172.00	100.00	Tetap			

		PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		sesuai standar	Jumlah balita di kabupaten/kota	31,172.00		31,172.00					
			1.b.7	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang Jumlah anak pendidikan dasar di kabupaten/kota	43,282.00 45,036.00	96.11	43,282.00 68,069.00	63.59	Berubah		Data Dukung di sesuai kan dengan data 1a (Jumlah anak 7-15 Tahun)	
			1.b.8	Persentase orang usia 15-29 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai	Jumlah orang usia 15-59 tahun yang mendapatkan Jumlah orang usia 15-59 tahun di kabupaten/kota	241,777.00 301,806.00	80.11	241,777.00 301,806.00	80.11	Tetap			
			1.b.9	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Jumlah orang usia 60 tahun keatas yang Jumlah warga negara usia 60 tahun ke atas di kabupaten/kota	16,342.00 38,642.00	42.29	16,342.00 38,642.00	42.29	Tetap			
			1.b.10	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan	Jumlah penderita hipertensi yang mendapatkan Jumlah penderita hipertensi di kabupaten/kota	16,941.00 95,023.00	17.83	16,941.00 95,023.00	17.83	Tetap			
			1.b.11	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan	Jumlah penderita DM yang mendapatkan layanan Jumlah penderita DM di kabupaten/kota	2,904.00 4,426.00	65.61	2,904.00 4,426.00	65.61	Tetap			
			1.b.12	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa	Jumlah penderita ODGJ yang mendapatkan Jumlah penderita ODGJ di kabupaten/kota	499.00 820.00	60.85	499.00 820.00	60.85	Tetap			
			1.b.13	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai	Jumlah penderita TBC yang mendapatkan layanan Jumlah penderita TBC di kabupaten/kota	1,741.00 7,274.00	23.93	1,741.00 7,274.00	23.93	Tetap			
			1.b.14	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan	Jumlah orang dengan resiko terinfeksi HIV yang Jumlah orang dengan resiko terinfeksi HIV di	2,845.00 16,071.00	17.70	2,845.00 16,071.00	17.70	Tetap			
			1.c.1	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan kabupaten/kota	Luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan kabupaten/kota (ha)	-	tdi	-	tdi	Tetap			
					Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS kewenangan kabupaten/kota (ha)	-		-					
			1.c.2	Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan kabupaten/kota	Luas kawasan permukiman rawan abrasi yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian pengaman pantai di WS Kewenangan kabupaten/kota (ha)	-	tdi	-	tdi	Tetap		Ditambahkan surat keterangan tidak memiliki pantai	
					Luas kawasan permukiman sepanjang pantai	-		-					
			1.c.3	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	Luas irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan yang dibangun (ha) ditingkatkan (ha) dioperasi dan pelihara (ha)	1,953.00	69.65	1,953.00	69.65	Tetap			
					luas daerah irigrasi kewenangan kabupaten kota	2,804.00		2,804.00					
			1.c.4	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	jumlah kumulatif masyarakat yang rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi di dalam sebuah kabupaten/kota	278,145.00	70.00		tdi	Berubah			
					Jumlah total proyeksi rumah tangga di seluruh	397,351.00							
			1.c.5	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	jumlah rumah yang memiliki akses pengolahan berupa cubluk + jumlah rumah yang lumpur tinjanya di olah di PLT + jumlah rumah yang memiliki sambungan rumah dan air limbahnya diolah di IPALD	202,425.00	50.94		tdi	Berubah			

KERTAS KERJA TIM DAERAH TAHUN 2022

		SOSIAL	1.f.1	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (indikator SPM)	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	782.00	6.69	782.00	6.69	Tetap			
			1.f.2	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	Populasi penyandang disabilitas terlantar, anak	11,692.00		11,692.00					
					Jumlah korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dalam satu tahun anggaran	7,564.00	61.40	7,564.00	61.40	Tetap			
					populasi korban bencana alam dan sosial yang	12,320.00		12,320.00					
C.	INDEKS CAPAIAN URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR	KETENAGAKERJAAN	2.a.1	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	Jumlah kegiatan keseluruhan yang dilaksanakan	-	tdi		tdi	Tetap			
			2.a.2	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	Jumlah kegiatan keseluruhan yang dilaksanakan di	-							
					Jumlah tenaga kerja yang memiliki sertifikat kompetensi	-	tdi		tdi	Tetap			
			2.a.3	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	Jumlah tenaga kerja keseluruhan	-							
					PDRB tahun berjalan (atas dasar harga konstan)		tdi	16,847,010,000,000.00	83040102.92	Berubah		lengkapi dari data bps	
			2.a.4	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	Jumlah tenaga kerja			202,878.00					
					Jumlah perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak	95.00	100.00	95.00	100.00	Tetap			
			2.a.5	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	Jumlah perusahaan	95.00		95.00					
					Jumlah pencari kerja yang ditempatkan	149.00	100.00		tdi	Berubah		lengkapi bukti dukung jumlah pencari kerja yang ditempatkan	
			PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	2.g.1	Persentase Tenaga Kerja Yang Ditempatkan (Dalam Dan Luar Negeri) Melalui Mekanisme Layanan Antar Kerja	Jumlah pencari kerja yang terdaftar	149.00		722.00				
					Persentase ARG pada belanja langsung APBD	-	tdi		tdi	Tetap			
				2.g.2	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait Kabupaten/Kota	Jumlah ARG pada belanja langsung APBD	-						
						Jumlah seluruh belanja langsung di APBD	-						
				2.g.3	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	Jumlah anak (penduduk usia kurang 18 tahun) korban kekerasan yang ditangani instansi tingkat kabupaten/kota yang didampingi	18.00	0.04	18.00	0.04	Tetap		
						Jumlah anak (penduduk usia kurang 18 tahun)	48,373.00		48,373.00				
		PANGAN	2.h.1	Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras/ jagung sesuai kebutuhan)	Jumlah perempuan yang mengalami kekerasan	18.00	37.21	13.00	6.60	Berubah		Data Dukung tambahan dari BPS	
					Jumlah penduduk perempuan	48,373.00		196,956.00					
		PERTANAHAN	2.i.1	Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras/ jagung sesuai kebutuhan)	Jumlah cadangan pangan	41,548.00	100.50	41,548.00	100.50	Tetap			
					Jumlah kebutuhan pangan	41,340.00		41,340.00					
			2.i.2	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya	Jumlah pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya	125.37	74.11	-	tdi	Berubah		Bukti dukung tidak tersedia	
					Seluruh luas tanah sesuai peruntukkan tanahnya	169.15		-					
			2.i.3	Persentase Penetapan Tanah Untuk Pembangunan Fasilitas Umum	Jumlah penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum		tdi	-	tdi	Tetap			
					Jumlah kebutuhan tanah untuk pembangunan			-					
				Tersedianya Lokasi Pembangunan Dalam Rangka Penanaman Modal	Luas tanah yang telah dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya di atas izin lokasi	8.00	100.00	-	tdi	Berubah		Data dukung tidak relevan	

				Luas izin lokasi yang diterbitkan	8.00		-						
		2.i.4	Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap didistribusikan yang berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	Jumlah penerima tanah obyek landreform dengan luasan yang diterima lebih besar sama dengan 0.5 ha	951.29	95.13	951.29	95.13	Tetap				
				Jumlah pemerima tanah obyek landreform	1,000.00		1,000.00						
		2.i.5	Tersedianya tanah untuk masyarakat	Luas tanah yang telah dimanfaatkan berdasarkan luas izin membuka tanah yang diterbitkan	12.00	100.00		tdi	Berubah			Lengkapi data dukung	
					12.00								
		2.i.6	Penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	Jumlah sengketa tanah garapan yang ditangani	25.00	100.00	25.00	100.00	Tetap				
				Jumlah pengaduan sengketa tana garapan	25.00		25.00						
	LINGKUNGAN HIDUP	2.j.1	IKLH	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten/Kota	61.72	61.72	61.72	61.72	Tetap			Bukti dukung lengkapi dg tanda tangan pjbt berwenang dan stempel	
		2.j.2	Terlaksananya Pengelolaan Sampah di Wilayah kabupaten/kota	Total volume sampah yang dapat ditangani	4,568.00	20.89	4,568.00	20.89	Tetap				
				Total volume timbunan sampah kabupaten/kota	21,862.00		21,862.00						
		2.j.3	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin	Jumlah penanggung jawab usaha dan atau usaha dan atau kegiatan dilakukan pemeriksaan	7.00 111.00	6.31		tdi	Berubah				
	ADMINDUKCAPIL	2.k.1.1	Perekaman KTP Elektronik	Jumlah penduduk wajib KTP-el yang telah melakukan perekaman	288,509.00	100.00	288,509.00	100.00	Tetap				
				Jumlah penduduk wajib KTP-el	288,509.00		288,509.00						
		2.k.1.2	Persentase anak usia 01-7 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	Jumlah anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari	33,438.00	27.06	33,438.00	27.06	Tetap				
				Jumlah anak usia 0-17 tahun	123,552.00		123,552.00						
		2.k.1.3	Kepemilikan akta kelahiran	Jumlah anak usia 0-18 tahun yang sudah memiliki	114,505.00	90.86	114,505.00	90.86	Tetap				
				Jumlah anak usia 0-18 tahun	126,020.00		126,020.00						
		2.k.1.4	Jumlah PD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan	Jumlah PD yang telah memanfaatkan data	2.00	4.88	2.00	4.88	Tetap				
				Jumlah PD	41.00		41.00						
	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	2.l.1	Persentase pengentasan desa tertinggal	Jumlah desa tertinggal yang memenuhi kriteria	1.00	100.00	1.00	100.00	Tetap	untuk bukti dukung data tahun awal	Silahkan timda kab muaro untuk menggunakan data tersebtu dan di		
				Jumlah desa tertinggal (per awal tahun-n)	1.00		1.00						
		2.l.2	Persentase Peningkatan Status Desa Mandiri	Jumlah desa berkembang yang memenuhi kriteria desa mandiri per tahun berdasarkan Indeks Desa Membangun per tahun	95.00	100.00	7.00	7.37	Berubah	untuk bukti dukung data tahun awal 2021 (pakai data idm 2020) dengan link https://drive.	Silahkan timda kab muaro untuk menggunakan data tersebtu dan di upload ke bukti dukung, atau bisa juga disarikan kemudian legalitas oleh dinas PMD kab muaro jambi		
				Jumlah desa berkembang (per awal tahun-n)	95.00		95.00						
	PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB	2.m.1	TFR (Angka Kelahiran Total)	ASFR = Angka Kelahiran Menurut Kelompok Umur	1.54	1.54	1.54	1.54	Tetap				
		2.m.2	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	Jumlah peserta KB aktif modern	44,474.00	62.14	44,474.00	62.14	Tetap				
				Jumlah pasangan usia subur	71,568.00		71,568.00						
		2.m.3	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	Jumlah PUS yang ingin ber-KB tetapi tidak terlayani	10,409.00	14.54	10,409.00	14.54	Tetap				
				Jumlah Pasangan Usia Subur	71,568.00		71,568.00						
	PERHUBUNGAN	2.n.1	Rasio konektivitas Kabupaten/Kota	Rasio konektivitas Kabupaten/Kota	83.00	salah tolong cek	33,6	33,6	Berubah			Sesuaikan dengan data dukung	
		2.n.2	V/C Ratio di Jalan Kabupaten/Kota	V/C Ratio di Jalan Kabupaten/Kota	33.60	salah tolong cek		tdi	Berubah			data dukung tidak relevan	
	KOMINFO	2.o.1	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (PD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	Jumlah PD yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh dinas kominfo	41.00	100.00	41.00	100.00	Tetap				
				Jumlah PD	41.00		41.00						
		2.o.2	Persentase Layanan Publik yang	Jumlah layanan publik diselenggarakan secara	2.00	28.57	2.00	28.57	Tetap			Bukti dukung di perbaiki	

		KOPERASI DAN UKM		diselenggarakan secara online dan	Jumlah layanan publik	7.00		7.00						
			2.o.3	Persentase Masyarakat Yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik,	Jumlah masyarakat yang menjadi sasaran	2,000.00	0.49	2,000.00	0.49	Tetap				
			2.p.1	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	Jumlah penduduk	412,052.00		412,052.00						
					Jumlah koperasi yang meningkat kualitasnya berdasarkan RAT, volume usaha dan aset	50.00	36.50	50.00	36.50	Tetap				
					Jumlah seluruh koperasi	137.00		137.00						
		2.p.2	Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirausaha	Jumlah usaha mikro yang menjadi wirausaha	-	0.00	-	0.00	Tetap		Data dukung tidak bisa di yakini, tidak ada tanda tangan dan stempel			
				Jumlah usaha mikro keseluruhan	40,000.00		40,000.00							
		PENANAMAN MODAL	2.q	Persentase peningkatan investasi di Kabupaten/Kota	Jumlah investasi PMDN dan PMA tahun 2020	19,461,759,424.00	2978.33	618,558,059,424.00	-3.15	Berubah				
		KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	2.r.1	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	Jumlah investasi PMDN dan PMA tahun 2021	599,096,300,000.00		599,096,300,000.00						
					Jumlah pemuda (16-30 tahun) yang berwirausaha		tdi	10,211.00	10.00	Berubah				
			2.r.2	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi	Jumlah pemuda (umur 16-30 tahun) di		tdi	102,108.00						
					Jumlah pemuda (16-30 tahun) yang menjadi		tdi	150.00	0.15	Berubah				
		STATISTIK	2.r.3	Peningkatan Prestasi Olahraga	Jumlah pemuda (umur 16-30 tahun) di			102,108.00						
					Jumlah perolehan medali pada event olahraga	1.00	1.00		tdi	Berubah		Data dukung belum dilengkapi		
			2.s.1	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (PD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	Jumlah PD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	24.00	58.54	24.00	58.54	Tetap				
					Jumlah PD	41.00		41.00						
					Jumlah PD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	21.00	51.22	21.00	51.22	Tetap				
		2.s.2	Persentase PD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	Jumlah PD	41.00		41.00							
		PERSANDIAN	2.t	Tingkat keamanan informasi pemerintah	Jumlah nilai per area keamanan informasi	80.00	salah tolong			tdi	Berubah		Data dukung tidak relevan	
		BUDAYA	2.u	Terlestarikannya Cagar Budaya	Jumlah area penilaian	10.00								
					Jumlah cagar budaya yang dilestarikan	-	tdi			tdi	Tetap		Data dukung tidak relevan	
					Jumlah cagar budaya yang terdata	-								
		PERPUSTAKAAN	2.v.1	Nilai tingkat kegemaran membaca	Jumlah cagar budaya yang terdata	-	0.00				tdi	Berubah		
					Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	-	0.00				tdi	Berubah		
			2.v.2	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Nilai Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat yang didapatkan dengan metode sensus dengan mengukur sejumlah unsur pembangunan literasi masyarakat (UPLM) dan aspek masyarakat (AM)	-	0.00				tdi	Berubah		
KEARSIPAN	2.w.1	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah	Jumlah cagar budaya yang terdata	-	0.00				tdi	Berubah				
			Nilai Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat yang didapatkan dengan metode sensus dengan mengukur sejumlah unsur pembangunan literasi masyarakat (UPLM) dan aspek masyarakat (AM)	-	0.00					tdi	Berubah			
			Jumlah cagar budaya yang terdata	-	0.00									
			Jumlah cagar budaya yang terdata	-	0.00									
			Jumlah cagar budaya yang terdata	-	0.00									
			Jumlah cagar budaya yang terdata	-	0.00									
			Jumlah cagar budaya yang terdata	-	0.00									
			Jumlah cagar budaya yang terdata	-	0.00									
			Jumlah cagar budaya yang terdata	-	0.00									
			Jumlah cagar budaya yang terdata	-	0.00									
			Jumlah cagar budaya yang terdata	-	0.00									
			Jumlah cagar budaya yang terdata	-	0.00									
			Jumlah cagar budaya yang terdata	-	0.00									
			Jumlah cagar budaya yang terdata	-	0.00									
			Jumlah cagar budaya yang terdata	-	0.00									
			Jumlah cagar budaya yang terdata	-	0.00									
			Jumlah cagar budaya yang terdata	-	0.00									
			Jumlah cagar budaya yang terdata	-	0.00									
			Jumlah cagar budaya yang terdata	-	0.00									
			Jumlah cagar budaya yang terdata	-	0.00									
			Jumlah cagar budaya yang terdata	-	0.00									
			Jumlah cagar budaya yang terdata	-	0.00									
			Jumlah cagar budaya yang terdata	-	0.00									
			Jumlah cagar budaya yang terdata	-	0.00									
			Jumlah cagar budaya yang terdata	-	0.00									
			Jumlah cagar budaya yang terdata	-	0.00									
			Jumlah cagar budaya yang terdata	-	0.00									
			Jumlah cagar budaya yang terdata	-	0.00									
			Jumlah cagar budaya yang terdata	-	0.00									
			Jumlah cagar budaya yang terdata	-	0.00									
			Jumlah cagar budaya yang terdata	-	0.00									
			Jumlah cagar budaya yang terdata	-	0.00									
			Jumlah cagar budaya yang terdata	-	0.00									
			Jumlah cagar budaya yang terdata	-	0.00									
			Jumlah cagar budaya yang terdata	-	0.00									
			Jumlah cagar budaya yang terdata	-	0.00									
			Jumlah cagar budaya yang terdata	-	0.00									
			Jumlah cagar budaya yang terdata	-	0.00									
			Jumlah cagar budaya yang terdata	-	0.00									
			Jumlah cagar budaya yang terdata											

KERTAS KERJA TIM DAERAH TAHUN 2022

			3.b.3	Tingkat Hunian Akomodasi	Jumlah kamar yang terjual		tdi	234.00	4.58	Berubah	234/14	14 Kamar yang tersedia di kali setahun (365)			
				Jumlah kamar yang tersedia			5,110.00								
			3.b.4	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	Jumlah Kontribusi sektor pariwisata terhadap Total PBRB harga berlaku		tdi		tdi	Tetap					
			3.b.5	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	Jumlah Pendapatan dari sektor pariwisata	1,143.00	tdi	685,500,000.00	0.62	Berubah	Jumlah Total PAD (Realisasi)	Data PAD dari LHP BPK			
					Jumlah total PAD (Realisasi)			110,745,449,485.60							
			PERTANIAN	3.c.1	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	136,463.00	6.78	136,463.00	6.78	Tetap				
						Luas Panen	20,126.00		20,126.00						
				3.c.2	Persentase Penurunan Kejadian dan Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular	Jumlah kejadian penyakit kasus tahun 2020	206.00	58.74	85.00	-242.35	Berubah		Sesuaikan dengan data dukung		
						Jumlah kejadian penyakit kasus tahun 2021	85.00		291.00						
			KEHUTANAN	3.d			-	100.00		100.00	Tetap				
			ESDM	3.e	Persentase perusahaan pemanfaatan panas bumi yang memiliki ijin di kabupaten/kota	Jumlah perusahaan pemanfaaaatan panas bumi yang memiliki ijin	-	tdi	-	tdi	Tetap				
						Jumlah perusahaan pemanfaatan panas bumi	-		-						
			PERDAGANGAN	3.f.1	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan	Jumlah pelaku usaha yang telah memiliki izin	13.00	100.00		tdi	Berubah		Bukti dukung tidak relevan, nilainya ekstrim dibanding dengan LPPD 2020		
						Jumlah pelaku usaha di wilayah kabupaten/kota	13.00								
				3.f.2	Persentase kinerja realisasi pupuk	Realisasi pupuk	1,960,214.00	13.64	19,542.14	97.79	Berubah		Data yang di input berbeda dengan data dukung		
						Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK)	14,369,169.00		19,983.48						
			PERINDUSTRIAN	3.f.3	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda	Jumlah UTTP bertanda tera yang berlaku pada	149.00	58.89	149.00	58.89	Tetap		Data dukung tidak ada tanda tangan pejabat penanggung jawab		
				3.g.1	Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di Kabupaten/Kota	Jumlah potensi UTTP yang wajib ditera dan tera	253.00		253.00				isian di sesuaikan dengan data dukung		
						Jumlah Industri kecil dan menengah tahun 2020	4.00	24825.00	997.00	0.40	Berubah				
					Jumlah Industri kecil dan menengah tahun 2021	997.00		1,001.00							
				3.g.2	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIK	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIK	50.00	50.00		tdi	Berubah		Data dukung tidak relevan		
				3.g.3	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	Jumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan								Data dukung pemantauan izin ditambahkan	
							7.00	100.00	7.00	100.00	Tetap				
						Jumlah izin yang dikeluarkan	7.00		7.00						
				3.g.4	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin	Jumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam	7.00	100.00		tdi	Berubah		Data dukung tidak relevan		
			3.g.5	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang	Jumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan	7.00	100.00		tdi	Berubah		Data dukung tidak relevan			
Jumlah izin yang dikeluarkan	7.00														
3.g.6	Tersedianya informasi industri secara	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan	60.00	60.00		tdi	Berubah		Data dukung tidak ada						
TRANSMIGRASI	3.h	-		1.00	100.00	-	100.00	Tetap		Tidak ada data dukung					
E.	INDEKS CAPAIAN URUSAN PEMERINTAHAN (PENUNJANG)	PERENCANAAN DAN KEUANGAN	4.a.1	Rasio Belanja Pegawai Di Luar Guru dan Tenaga Kesehatan	Jumlah belanja pegawai di luar guru dan tenaga kesehatan		tdi		tdi	Tetap	Data yang diambil adalah Realisasi Belanja	Data dukung belum tersedia			
				Total belanja APBD (Realisasi)											
			4.a.2	Rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Jumlah PAD (Realisasi)	11,062,044,936,591.00	1266.93	110,745,449,485.60	tdi	Berubah					

					Jumlah PDRB Non Migas	873,136,800,000.00							
			4.a.3	Mauritas Sistem Pengendalian Intern	Tingkat Mauritas SPIP	2.00	2.00	2.00	2.00	Tetap			
			4.a.4	Peningkatan Kapabilitas Aparat	Tingkat Kualitas APIP	2.00	2.00	2.00	2.00	Tetap			
			4.a.5	Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures)	Total Belanja Urusan Pemerintahan	80,946,186,445,000.00	61.01		tdi	Berubah			
					Total belanja APBD	132,674,511,313,340.00		13,267,451,131,311.40					
		PENGADAAN	4.a.5	Opini Laporan Keuangan	Opini BPK atas Laporan Keuangan 10 Tahun	9.00	9.00	9.00	9.00	Tetap			
			4.b.1	Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun	Jumlah kontrak infrasrtuktur dengan nilai besar	-	0.00	0.00	0.00	Tetap			
					Jumlah kontrak keseluruhan tahun 2021	146.00		146.00					
			4.b.2	Persentase Jumlah Pengadaan yang Dilakukan Dengan Metode Kompetitif	Jumlah pengadaan yang dilakukan dengan Jumlah keseluruhan pengadaan baik yang dilakukan dengan metode kompetitif maupun tanpa metode kompetitif	24,000,000,000.00	1.51	24,000,000,000.00	1.51	Tetap			
						1,593,000,000,000.00		1,593,000,000,000.00					
			4.b.3	Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	Jumlah nilai belanja langsung yang melalui Total belanja langsung	354,408,000,000.00	26.71	354,408,000,000.00	26.71	Tetap			
						1,326,745,113,133.00		1,326,745,113,133.00					
			4.b.4	Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, Dan Koperasi Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah	Jumlah Nilai PBJ yang Menggunakan Produk Dlm Negeri, Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi Tahun 2020	-	salah tolong cek	367,566,000,000.00	-3.81	Berubah			
					Jumlah Nilai PBJ yang Menggunakan Produk	352,078,541,775.00		353,570,000,000.00					
		KEPEGAWAIAN	4.c.1	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Jumlah pegawai menurut pendidikan Perguruan Tinggi ke atas	4.62	0.71	4.62	0.71	Tetap			
					Seluruh jumlah pegawai pemerintah (PNS tidak	648.00		648.00					
			4.c.2	Rasio pegawai Fungsional (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Jumlah pegawai PNS fungsional (diluar guru dan	331.00	19.09	331.00	19.09	Tetap			
					Seluruh jumlah pegawai pemerintah (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	1,734.00		1,734.00					
			4.c.3	Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Jumlah pegawai fungsional yang memiliki sertifikat kompetensi	43.00	1.22	43.00	1.22	Tetap			
		MANAJEMEN KEUANGAN			Seluruh jumlah pegawai fungsional (PNS tidak	3,529.00		3,529.00					
			4.d.1	Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	Nilai absolut dari total belanja dalam realisasi	1,326,745,113,133.40	0.97	1,326,745,113,133.40	0.97	Berubah			
					Total belanja APBD dikurangi satu	1,371,599,819,353.00		1,369,025,337,321.71					
			4.d.2	Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	Nilai absolut dari total PAD dalam realisasi	110,745,346,974.61	salah tolong cek	110,745,449,485.61	salah tolong cek	Tetap			
					Total PAD dalam APBD dikurangi satu	102,259,898,222.00		97,314,421,591.00					
			4.d.3	Assets Management	Total Assets Management	100.00	salah tolong	4.00	4.00	Berubah			
			4.d.4	Rasio Anggaran Sisa Terhadap Total Belanja Dalam APBD Tahun Sebelumnya	Nilai realisasi SILPA	151,489,834,564.09	10.89	88,023,852,139.53	6.33	Berubah			
					Total belanja anggaran tahun sebelumnya	1,391,582,516,692.30		1,391,582,516,705.32					
		TRANSPARANSI DAN PARTISIPASI PUBLIK	4.e.1	Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan	Realisasi Belanja untuk unit pelayanan dapat Anggaran belanja untuk unit pelayanan dapat	76,300,000.00	99.22	76,300,000.00	99.22	Tetap			
						76,900,000.00		76,900,000.00					
			4.e.2	Akses publik terhadap informasi keuangan daerah	Jumlah dokumen yang dipublikasikan di wensite pemda	9.00	100.00	1.00	8.33	Berubah			
					Total jumlah dokumen yang telah dirinci	9.00		12.00					

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, XX bulan 2022
Bersama-sama menyetujui hasil pelaksanaan Klarifikasi/verifikasi sebagaimana terlampir diatas,

Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota

Ketua Teknis Tim Daerah EPPD

(.....)

1.

2.

Inspektur Kabupaten/Kota

3.

(.....)